



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

- Nama** : HIMMEL SIHOMBING
- Jabatan** : VICE PRESIDENT KONSTRUKSI DAN PEMELIHARAAN TRANSMISI
SUMATERA, JAWA, MADURA DAN BALI
- NHK** : 195680

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.063.680.778**

- Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/82 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 292.250.778
- Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/60 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/60 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 81.000.000
- Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/60 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 77.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , Rp. 113.430.000
- Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, Rp. 350.000.000



10. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/90 m² di KAB / KOTA
TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INOVA V MANUAL Tahun 2019, HASIL SENDIRI
, LAINNYA , Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 427.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.200.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 170.491.742

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.050.000.000

Sub Total Rp. 6.161.372.520

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.161.372.520

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.